



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : T-04145/Dt.4.3/PP.01/03/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Undangan Peserta

Jakarta, 11 Maret 2025

Yth.

1. Seluruh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
2. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota
di tempat

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dan dimulainya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 khususnya terkait arah kebijakan dan target penurunan kemiskinan, diperlukan penyelarasan dan sinergi perencanaan program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengundang Saudara/i untuk hadir pada **Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025** yang akan dilaksanakan secara daring:

pada hari/tanggal : Senin, 17 Maret 2025
waktu : Pukul 08.30 – 14.45 WIB
tautan : <http://link.bappenas.go.id/RakornasPK2025>

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut diatas, kami mohon kehadiran Saudara/i dan mengisi konfirmasi kehadiran melalui tautan <https://link.bappenas.go.id/KonfirmasiRakornas2025>. Untuk koordinasi lebih lanjut, kami menugaskan Sdr. Al Ruchban (Telp. 0821-8756-1994) sebagai narahubung.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan
Pemberdayaan Masyarakat,



Tirta Sutedjo

Tembusan:

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan,
Kementerian PPN/ Bappenas (*sebagai laporan*)

KERANGKA ACUAN KERJA
Rapat Koordinasi Tingkat Nasional
Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia saat ini menuju menjadi negara maju sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mencapai visi tersebut, sasaran yang telah ditetapkan adalah memastikan tingkat kemiskinan menurun hingga mendekati 0% (0,5–0,8%) dan ketimpangan berkurang, baik ketimpangan antarpenduduk (menuju tingkat Rasio Gini 0,29–0,32) maupun ketimpangan antarwilayah (menuju peningkatan kontribusi PDRB daerah di Kawasan Timur Indonesia mencapai 28,5%) pada tahun 2045.

Selama beberapa dekade terakhir, berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan, termasuk perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, penguatan akses dan kapasitas ekonomi produktif, hingga peningkatan akses dan kualitas layanan dasar mampu menekan tingkat kemiskinan secara signifikan. Tercatat tahun 2018, untuk pertama kalinya dalam sejarah pembangunan Indonesia, upaya pemerintah melalui berbagai program di atas berhasil menurunkan tingkat kemiskinan hingga satu digit, yaitu 9,82%. Namun demikian, tren penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi masih relatif landai, yaitu rata-rata per tahun kurang dari 0,5%. Hal ini menjadi persoalan penting mengingat target tingkat kemiskinan mendekati 0% pada tahun 2045 harus tercermin dari rata-rata tingkat penurunan kemiskinan di atas 0,5 % bahkan di atas 1% per tahun.

Oleh karena itu, empat pilar utama kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan, yaitu stabilitas ekonomi nasional, pengurangan beban penduduk miskin, peningkatan pendapatan, dan pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan perlu diperkuat mekanisme koordinasi dan strategi pelaksanaannya. Lebih dari itu, dukungan kerangka regulasi yang kuat dan tata kelola kelembagaan yang memadai juga sangat diperlukan. Penguatan sinergi dan dukungan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan pihak-pihak di luar pemerintah, mulai dari sinergi pendanaan alternatif, kerja sama pemerintah-swasta, maupun proyek kolaboratif dengan organisasi masyarakat dan komunitas juga sangat diperlukan untuk memperluas khazanah dan alternatif pendekatan pemberantasan kemiskinan.

Kebijakan pemerintah pusat harus didukung dengan kebijakan pemerintah daerah agar implementasinya dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah pusat menetapkan arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional, yang selanjutnya menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan daerah. Penting untuk membuat target dan kebijakan yang *in line* antara kebijakan pusat dan daerah, agar dapat saling

mendukung dan tidak bertentangan. Koordinasi yang baik akan menciptakan kebijakan yang tersinkronisasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Saat ini salah satu kebijakan pemerintah pusat dalam RPJPN 2025-2045 adalah perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Selain itu, salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029 adalah melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan dilaksanakan sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas penyaluran bantuan sosial yang adaptif terhadap berbagai kondisi dan terdigitalisasi, dan Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif dilaksanakan sebagai upaya mendukung peningkatan kesejahteraan penerima Kartu Usaha Afirmatif yang tergambarkan melalui jumlah penerima manfaat Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha atau bekerja sebagai buruh/karyawan mencapai 1.000.000 jiwa pada tahun 2025.

Salah satu *game changer* dari optimalisasi kebijakan dan program di atas adalah tersedianya satu sistem data tunggal kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi untuk memastikan akurasi program kepada penerima manfaat. Saat ini sesuai dengan Inpres 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) yang di dalamnya terdapat data DTKS, P3KE, dan Regsosek. Selain itu, seiring dengan bergesernya pola konsumsi masyarakat yang menjadi basis penghitungan garis kemiskinan, Bappenas bersama dengan BPS saat ini sedang melakukan upaya penyempurnaan metodologi pengukuran kemiskinan yang diharapkan dapat menjadi instrumen pensasaran program yang lebih akurat. Integrasi juga dilakukan di level program, misalnya melalui program Kartu Kesejahteraan dan program Kartu Usaha yang mencoba mengintegrasikan mekanisme bantuan sosial, upaya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan masyarakat dalam sebuah mekanisme yang lebih kolaboratif untuk mempercepat proses graduasi menuju kemandirian penduduk miskin.

Dalam kerangka sinergi dan kolaborasi tersebut Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 kepada pemerintah daerah. Agenda Rakornas ini diharapkan menjadi tonggak awal (*milestone*) untuk menyamakan persepsi, target, dan kesamaan visi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pusat dan daerah. Acara ini juga diharapkan menjadi *platform* bagi para pemangku kepentingan untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan bersama-sama merumuskan ide sinergi, penyelarasan, dan kolaborasi tentang penajaman strategi serta orkestrasi penyusunan agenda rencana aksi berbasis 'Gerakan Nasional Pemberantasan Kemiskinan' yang dilakukan secara multipihak.

B. TUJUAN

Tujuan penyelenggaraan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan 2025 adalah menyelaraskan perencanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan capaian pembangunan dan aspirasi, maupun kondisi khusus yang dihadapi di tingkat daerah. Hasil penyelarasan ini selanjutnya diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pusat dan daerah, termasuk harmonisasi program-program yang didukung oleh data dan sistem pentargetan yang lebih akurat, sehingga intervensi yang diambil dapat lebih efektif dalam mempercepat pengurangan kemiskinan dan ketimpangan di daerah.

Pemerintah provinsi selanjutnya diharapkan melakukan penyelarasan target dan kebijakan penanggulangan kemiskinan bersama pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya sebagai dasar menyusun dokumen perencanaan daerah.

C. RUANG LINGKUP

1. Penyampaian arahan dan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029 dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.
2. *Sharing session* praktik baik program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
3. Pendalaman dan penyelarasan perencanaan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan di 10 provinsi prioritas RPJMN 2025 - 2029

D. AGENDA KEGIATAN

Waktu (WIB)	Agenda	Pembicara	Keterangan
08.30 – 08.35	Pembukaan oleh MC		
08.35 – 08.40	Menyanyikan lagu Indonesia Raya		
08.40 - 08.45	Pembacaan Doa		
Pembukaan			
08.45 – 09.05	Sambutan	Direktur Jenderal Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri	
09.05 – 09.25	Sambutan	Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat	
09.25 – 09.45	Sambutan Kunci (Keynote Speech)	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan dan	

Waktu (WIB)	Agenda	Pembicara	Keterangan
		Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/ Bappenas	
Sesi Panel I: Arahan Kebijakan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah			
09.45 – 10.05	Topik: Kebijakan Kewilayahan dan Kemandirian Desa Untuk Mendukung Penanggulangan Kemiskinan	Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PPN/ Bappenas	Moderator: Direktur SUPD III, Kemendagri
10.05 – 10.25	Topik: Pemanfaatan Data DTSEN untuk Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan	Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital, Kementerian PPN/Bappenas	
10.25 – 10.45	Topik: Pemenuhan Hak dan Akses Infrastruktur Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan	Deputi Bidang Infrastruktur, Kementerian PPN/ Bappenas	
10.45 – 11.05	Topik: Integrasi Program Kewirausahaan untuk Meningkatkan Pendapatan Para Pelaku Usaha Miskin dan Rentan	Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian UMKM	
11.05 – 11.25	Topik: Integrasi Program-program Perlindungan Sosial untuk Penguatan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan	Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial	
11.25 – 13.00	ISHOMA		

Waktu (WIB)	Agenda	Pembicara	Keterangan
Sesi Panel II- <i>Talk Show</i> : Inisiatif dan Inovasi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan			
13.00 – 13.15	Praktik Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan untuk Kemiskinan Perkotaan	Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta	Moderator: Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas
13.15 – 13.30	Praktik Pelaksanaan Antar Integrasi Data Kemiskinan untuk Pensasaran Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
13.30 – 13.45	Praktik Baik Program Gercep Gaskan Berdaya dan Padungku sebagai Bagian dari Upaya Percepatan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	
13.45 – 14.00	Praktik Pelaksanaan Tata Kelola dan Kelembagaan Untuk Penanggulangan Kemiskinan	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi	
14.00 - 14.15	Praktik Baik Program Ado Gawe Dan Rantang Dalam Penciptaan Lapangan Kerja Bagi Pemuda Dan Keluarga Kurang Mampu, Serta Progam Rantang Dalam Pemberian Bantuan Makanan Bergizi Bagi Lansia Dan Keluarga Kurang Mampu	Sekretaris Daerah Kabupaten Palembang	
14.15 – 14.30	Diskusi dan tanya-jawab		
14.30 - 14.45	Penutupan	Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/ Bappenas	Penyampaian <i>Wrap Up</i> dan Penutupan Kegiatan Rapat Koordinasi Pusat

E. PESERTA

Peserta kegiatan terdiri dari:

1. Pemerintah Pusat
Perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, serta Kementerian/Lembaga lainnya yang terkait dengan perencanaan dan pengentasan kemiskinan.
2. Pemerintah Daerah
Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda serta Dinas terkait seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berfokus pada perencanaan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan kesejahteraan sosial.

F. LOKASI DAN WAKTU PELAKSANAAN

hari, tanggal : Senin, 17 Maret 2025
waktu : 08.30 – 14.45 WIB
tautan : <http://link.bappenas.go.id/RakornasPK2025>

G. OUTPUT YANG DIHARAPKAN

1. Rencana Tindak Lanjut, mencakup langkah-langkah konkret yang perlu diambil oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan rekomendasi yang telah disusun secara sinergis dan kolaboratif.
2. Kesepahaman dan kesepakatan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membangun mekanisme koordinasi dan kolaborasi yang lebih intensif, efektif, dan efisien dalam upaya percepatan pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan di daerah.

H. OUTCOME

1. Integrasi kebijakan pemerintah pusat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
2. Adanya keselarasan target-target pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

I. PENUTUP

Rakornas ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi, sinergi, kolaborasi, antara pusat dan daerah, yang diawali dengan upaya pengembangan sekaligus pemanfaatan data tunggal kemiskinan Indonesia. Dengan koordinasi yang lebih baik dan pemanfaatan data yang optimal, upaya pengentasan kemiskinan diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Rakornas ini juga diharapkan dapat menghasilkan rencana aksi yang konkret dan terukur untuk memastikan pencapaian target pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dalam rangka mendukung tercapainya Visi Indonesia Emas 2045.

J. PEMBIAYAAN

Kegiatan ini bekerja sama dengan Program Kemitraan Australia-Indonesia - Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) untuk mendukung kelancaran acara.